

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. M., Wa Ode Aswati, & Astrinigita. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Senjangan Anggaran terhadap Kinerja Pejabat Eselon III dan IV Pada Dinas Kesehatan Kota Kediri. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume II/2*, 61-72.
- Abdullah, H. (2005). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelapora terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada kabupaten dan Kota di daerah Istimewa Yogyakarta). *KOMPAK*, .13, 37-67.
- Afrina, D. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Jom FEKON Vol. 2 No. 2*, 1-15.
- Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, 1-7.
- Anthony, R., Dearden, & Bedford. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen Edisi V*. Jakarta: Erlangga.
- Anthony, Robert N, & Govindarajan, V. (2005). *Sistem pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fauzan, R. H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). *Fakulty of Economics Riau University*.
- Fitriana, R. D., Hidayati, N., & Mawardi, M. (2018). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo . *E-JRA Vol. 07 No. 02*, 1-13.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hansen, & Mowen. (2015). *Akuntansi Manajerial buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indratoro, N., & Supomo, B. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Indrayani, L. F., Diatmika, P. G., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar) . *Jurusan Akuntansi Program S1 Vol: 8 No. 2* , 1-13.
- Kenis, I. (1979). Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*, 707-721.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Munandar, A. (2001). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Depok: Universitas Indonesia (UI Press).
- Nafarin, M. (2007). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, N. A., & Panggabean, F. Y. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, Vol 8, No. 1*, 1-19.
- Pramitha, I., & Gayatri. (2016). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3).
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . *JEA Vol. 1 No.1*, 1-16.
- Putra , B. A. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Desentralisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Skpd Bengkalis). *JOM Fekon, Vol. 3 No. 1*, 1123-.
- Rokhlinsari, S. (2016). Teori-teori dalam Pengungkapan Informasi. *Jurnal Ekonomi*.

- Setyawan, H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Online Mahasiswa 4 (1)*.
- Setyawan, H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating. *JOM Fekon Vol. 4 No.1*, 251-264.
- Sudarsana, Susila, H., & S. N. Rahardjo. (2013). Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia). *Jurnal of Accounting Vol.2, NO.4*, 1-13.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widagdo, Kencana, A., & Munir, M. (2017). Prifil Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemeintah Daerah. *Jurnal Ekonomi san BIsnis, Vol.20 No.2*, 303-330.
- Yuhertina, I. (2003). Principal-Agent Theory dalam Proses Perencanaan Anggaran Sektor Pbluk. *Jurnal Akuntansi, Mnajemen, dan Sistem Informas*, 403-422.
- Yulianti, R., Hardi, & Rusli. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan). *JOM FEKON Vol.1 No.2*, 1-15.
- Zakiyudin, M., & Suyanto. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *JEL Classification H53*, 1-8.

Sumber lain

Undang Undang RI No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 pasal 265 ayat 2